

A **A** **F** **A** **M** **M** **A**
M **A** **M** **A**
A **A**
2001 **2010**

□ □ □ □ □



ia **kan** **I**
A **A** **A**
A111 0 **00**

F **A** **M**
A **M** **M**
A **A** **A**
M **A** **A**
2012

A A F A F A M M A
M A
A A
2001 2010



A A
A111 000

M M

M M

M M

r. A .MA
1 12 11 0 101

rs. A. A A MA M. i
1 1101 1 02 1001



Devyanti Patta, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001 – 2010* (dibimbing oleh Paulus Uppun dan A. Baso Siswadarma)

Permasalahan dalam penelitian apakah pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka digunakan metode analisis statistik regresi linear berganda. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan, dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi ternyata memiliki nilai $\text{sig} = 0,001 < 0,05$, karena nilai sig kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian hipotesis terbukti.

Pengaruh persentase penduduk miskin, terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Sulawesi Selatan berpengaruh signifikan. Dari hasil uji regresi diketahui bahwa nilai $\text{sig} = 0,002 < 0,05$ berarti ada pengaruh negatif dan signifikan dengan IPM. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial untuk pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki nilai $\text{sig} = 0,008 < 0,05$, sedangkan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM yang memiliki nilai $\text{sig} = 0,013 < 0,05$, karena nilai $\text{sig} < 0,05$ berarti signifikan. Dengan demikian hipotesis terbukti. Pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap IPM yang menunjukkan nilai $\text{sig} = 0,001 < 0,05$ berarti ada pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap IPM.

□A□A □□□□A□□A□

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin di Makassar. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan hal tersebut di atas penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmatia, SE. MA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs. Hidayat Ely, M.Si selaku penasehat akademik selama saya menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas saran dan nasehat yang telah bapak berikan kepada saya.
3. Bapak Dr. Paulus Uppun, SE., MA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. A. Baso Siswadarma, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan buah pikirannya untuk memberikan pengarahan kepada penulis demi penyelesaian dan penyempurnaan isi skripsi ini.
4. Bapak Prof. Muhammad Amri. Ph.D selaku penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan kearah penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Madris, DPS, M.Si selaku penguji terima kasih atas masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Suharwan Hamzah, SE., M.Si selaku penguji yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kearah penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap dosen yang telah membantu penulis khususnya pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar.
8. Pimpinan beserta staf pada BPS yang telah memberikan data-data yang mendukung penelitian.
9. Kedua orang tuaku terkasih papa (Drs. Andarias Patta) dan mama (Cory Pasang) terima kasih atas perlindungan, kasih sayang, cinta, dan dukungan serta pengorbanan yang selalu diberikan dengan tulus kepada anak-anaknya.
10. Saudara/i ku tersayang kak Lucky, kak Anne, dan saudara kembar ku deby terima kasih atas doa dan dukungan kalian.
11. Someone special 'Evhan' yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan serta semangat kepada penulis. Terima kasih buat semuanya.
12. Buat Sahabat saya Ipha, Filta, Anggi, Fyra, Ikha, Uphie, Bambang yang senantiasa membantu dan mendengarkan keluh kesah saya selama menjalani pendidikan di FEB. Terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian semua.
13. Buat teman-teman 'ICONIC 08' terima kasih atas Supportnya semoga teman-teman yang lain cepat menyelesaikan studinya dan bisa menjadi Sarjana terbaik.
14. Segenap staf dan karyawan FEB UNHAS atas bantuannya, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang juga telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, 20 April 2012

Penulis

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SKEMA	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Masalah Pokok	12
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Landasan Teori	16
2.1.1 Definisi Pembangunan Manusia	16
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia	18
2.1.2.1 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia	19
2.1.2.2 Komponen-Komponen IPM	21
2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	23
2.1.4 Kemiskinan	26
2.1.4.1 Pengertian Kemiskinan	26
2.1.4.2 Penyebab Kemiskinan	28
2.1.4.3 Karakteristik atau Ciri-ciri Penduduk Miskin ...	30
2.1.5 Pengeluaran Pemerintah.....	30
2.1.6 Ketimpangan Distribusi Pendapatan	32
2.1.6.1 Pengertian Distribusi Pendapatan	32
2.1.6.2 Teknik Perhitungan Ketimpangan Distribusi Pendapatan	34
2.1.7. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan	

	Kesehatan), dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Terhadap IPM	38
	2.1.7.1 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM	38
	2.1.7.2 Hubungan antara Tingkat Kemiskinan Dengan IPM	43
	2.1.7.3 Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah (Pendidikan dan Kesehatan) dengan IPM	46
	2.1.7.4 Hubungan antara Ketimpangan Distribusi Pendapatan dengan IPM	49
	2.2. Penelitian-Penelitian Sebelumnya.....	52
	2.3. Kerangka Pikir	54
	2.4. Hipotesis	56
BAB III	METODE PENELITIAN	57
	3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	57
	3.2. Jenis dan Sumber Data	57
	3.3. Metode Analisis	58
	3.4. Definisi Operasional Variabel	62
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
	4.1. Analisis Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Persentase Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah, Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan IPM Tahun 2001 – 2010	64
	4.2. Uji Asumsi Klasik	69
	4.3. Analisis Persamaan Regresi	74
	4.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	77
	4.5. Pengujian Hipotesis Secara Parsial	79
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	84
	5.1. Kesimpulan	84
	5.2. Saran-saran	85
	DAFTAR PUSTAKA	87

Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Selatan (2006-2010)	8
Tabel 4.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Tahun 2001 s/d 2010.....	65
Tabel 4.2	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2001 s/d Tahun 2010	66
Tabel 4.3	Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan Tahun 2001 s/d tahun 2010	67
Tabel 4.4	Perkembangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan dengan IPM Tahun 2001 s/d tahun 2010.....	68
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas dengan Uji Kolmogorov-Smirnov	69
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinieritas	71
Tabel 4.7	Hasil Uji Heterokedastisitas	72
Tabel 4.8	Hasil Uji Autokorelasi	74
Tabel 4.9	Hasil Uji Regresi dengan Menggunakan SPSS Release 12	75
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Determinasi	78
Tabel 4.11	Hasil Uji Statistik F (F-Test)	78

□AF□A□ □□□MA

Halaman

Skema 1.	Kerangka Pikir	55
----------	----------------------	----

□A□ □

□□□□A□□□□A□

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu langkah dalam membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada atau membuat suatu perubahan yaitu membuat sesuatu menjadi lebih baik atau meningkat. Pembangunan nasional yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini nampaknya sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. (□□□□: *□□mant Development Report 2000:16*)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses untuk perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya-upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar dapat sepenuhnya berpartisipasi di segala bidang pembangunan **□□nit□d □ation** **□□□□lo□□□nt □ro□ra□ □□□□□□□□**. Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subyek pembangunan yang artinya pembangunan dilakukan memang bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat (<http://google.co.id>)

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, lebih dari sekedar peningkatan pendapatan dan lebih dari sekedar proses produksi

komoditas serta akumulasi modal. Alasan mengapa pembangunan manusia perlu mendapat perhatian adalah: pertama, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi ternyata tidak berhasil mengurangi masalah-masalah sosial, seperti: penyalahgunaan obat, AIDS, alkohol, gelandangan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Ketiga, beberapa negara berpendapatan rendah mampu mencapai tingkat pembangunan manusia yang tinggi karena mampu menggunakan secara bijaksana semua sumber daya untuk mengembangkan kemampuan dasar manusia.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara. IPM adalah suatu tolak ukur angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean year of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup. Ketiga indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, selain itu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja yang ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah sehingga IPM akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan

dan nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. (*United Nation Development Programme, UNDP, 1990*).

Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh pemenang nobel India **Abrar Khan** dan **Mahmud Ali** seorang ekonom Pakistan dibantu oleh **Justin** dari Yale University dan **Lord Mahmud Sai** dari London School of Economics. UNDP dalam model pembangunannya, menempatkan manusia sebagai titik sentral dalam semua proses dan kegiatan pembangunan.

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari 4 (empat) komponen utama, yaitu : (1) Produktifitas, masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia, (2) Ekuitas, masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini, (3) Kestinambungan, akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi, (4) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka menjadi agen pertumbuhan yang efektif.

Modal manusia (human capital) merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (Lori Orlas). Dalam teori Cobb-Douglas mengemukakan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kualitas human capitalnya. Dengan modal manusia yang berkualitas kinerja ekonomi diyakini juga akan lebih baik. Kualitas modal manusia ini misalnya dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, ataupun indikator-indikator lainnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu pula dilakukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi daerah. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya.

Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia, baik semua orang, perempuan maupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan.

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, menurut (Kritno 2001) yaitu: (1) Peran

Stabilisasi, Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

Seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah dalam rangka menjalankan ke-tiga peran yang ada, maka tentunya diperlukan pula dana yang besar sebagai bentuk pengeluaran segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan ke-tiga peran tersebut. Pengeluaran pemerintah ini merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang diambil dan diterapkan melalui ke-tiga peran tersebut.

Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu wilayah. Kebijakan pemerintah dalam tiap pembelian barang dan jasa guna pelaksanaan suatu program mencerminkan besarnya biaya yang akan dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program

tersebut. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor publik yang penting, diantara kesemua sektor publik saat ini yang menjadi prioritas pemerintah dalam mencapai pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam kaitannya yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan Investasi pada sektor ini akan berpengaruh pada peningkatan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan. Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan dan pendidikan adalah salah satu komponen utama selain pendapatan. Kesehatan serta pendidikan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan membutuhkan manusia yang berkualitas sebagai modal dasar bagi pembangunan. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendorong peran manusia dalam pembangunan. Oleh karenanya dibutuhkan investasi untuk dapat menciptakan pembentukan sumber daya manusia yang produktif.

Investasi pada modal manusia diharapkan akan berpengaruh positif terhadap kinerja perekonomian yang salah satunya dapat diamati dari aspek tingkat pendidikan, kesehatan dan tingkat kemiskinan. Investasi modal manusia

ini yang mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia membutuhkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dalam mendorong peningkatan kualitas SDM. Menurut **Mankiw (2000)**, pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia.

Tentu dalam kaitan itu juga penting adanya distribusi pendapatan. Dengan distribusi pendapatan yang baik membuka kemungkinan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini karena dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat kesehatan dan juga pendidikan akan lebih baik dan pada gilirannya juga akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja. Studi **Al-sina dan Rodrik** (lihat **Mirr dan Pappa, 2000**) menemukan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak buruk juga pada pembangunan manusia suatu daerah.

Selain itu rumah tangga masyarakat memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, di mana pengeluaran rumah tangga memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia, seperti: makanan, kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran rumah tangga ditentukan oleh pendapatan. Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin **(Caris dan Riata Intin, 2000)**

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh **M. La Raan** yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia menemukan adanya hubungan positif antara PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, dan penanaman modal asing terhadap IPM sedangkan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Dalam kasus Sulawesi Selatan sendiri, data publikasi BPS memperlihatkan bahwa secara absolut, IPM Sulawesi Selatan telah mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam beberapa tahun terakhir, terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan 2006-2010

Tahun	IPM
2006	68,81
2007	67,75
2008	70,22
2009	70,94
2010	71,62

Sumber: BPS, 2011

Capaian kinerja IPM Sulawesi Selatan memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk mengangkat posisi relatif IPM Sulawesi Selatan ke level yang diharapkan. Posisi relatif Sulawesi Selatan hanya bergerak dari peringkat ke-23 tahun 2007 menjadi ke-19 pada tahun 2010. Capaian ini masih tampak jauh dari posisi yang ditargetkan. Bahkan capaian ini menjadi tampak buruk mengingat berbagai dimensi pembangunan daerah lainnya justru menunjukkan kinerja yang cukup impresif, seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

Laju indeks pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Selatan tidak secepat pertumbuhan ekonomi. Dimana laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan meningkat secara signifikan dari 6,20 % pada tahun 2009 menjadi 8,18 % pada tahun 2010. Sementara itu persentase penduduk miskin tahun 2009 tercatat sebanyak 12,31 persen kemudian tahun 2010 turun menjadi 10,60 persen.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun serta menurunnya tingkat kemiskinan, peningkatan laju pembangunan manusia sudah seharusnya juga dapat meningkat secara signifikan sebesar peningkatan laju pertumbuhan serta penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi dalam kenyataannya perkembangan IPM Sulawesi Selatan mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidaklah terlalu besar.

Ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan dapat dikategorikan ketimpangan rendah karena angka gini rasio tidak lebih dari 0,4 persen namun cenderung meningkat tiap tahun dimana pada tahun 2009 angka gini rasio tercatat 0,39 persen dan meningkat menjadi 0,40 persen pada tahun

2010. Hal ini tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat secara signifikan. Dengan tidak meratanya distribusi pendapatan maka akan berdampak pada pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.

Sementara pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan tidak jauh berbeda dengan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang masih minim dimana pada tahun 2009 pengeluaran pemerintah bidang kesehatan hanya sebesar 172.567.323.456 rupiah dari total belanja APBD Sulsel sebesar 2.455.558.026.755 rupiah dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan hanya sebesar 87.123.456.654 rupiah dari total belanja APBD Sulsel. Rendahnya pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia khususnya di kedua sektor ini. Mengingat kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal pokok untuk mencapai kehidupan yang layak.

Selain itu, tidak membaiknya secara signifikan peringkat IPM Sulawesi Selatan secara nasional disebabkan oleh pergerakan nilai IPM Sulawesi Selatan yang tidak cukup akseleratif. Bahkan beberapa dimensi pembentuk IPM menunjukkan nilai yang lebih rendah, meskipun peningkatannya sedikit lebih cepat dibandingkan dengan capaian Nasional. Sekedar komparasi, angka melek huruf secara Nasional pada tahun 2010 sudah mencapai 92,91 persen, sedangkan Sulawesi Selatan baru mencapai 87,75 persen. Indikator angka melek huruf menunjukkan kinerja yang paling mengkhawatirkan, bukan hanya karena memiliki kesenjangan yang sangat tajam dengan angka Nasional, tetapi juga bergerak naik sangat lamban. Pada tahun 2010, angka melek huruf penduduk

berusia 15 tahun ke atas di Sulawesi Selatan hanya sebesar 87,75 persen. Artinya, setiap delapan penduduk di Sulawesi Selatan, satu diantaranya buta huruf. Hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran pemerintah disektor pendidikan.

Begitu pula rata-rata lama sekolah secara nasional tahun 2010 sudah mencapai 7,9 tahun, sedangkan Sulawesi Selatan baru mencapai 7,8 tahun. Angka rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada jauh di bawah angka Nasional serta masih sangat senjang dengan target RPJMD. Pada tahun 2007, rata-rata lama sekolah masih 7,2 tahun dan meningkat menjadi 7,8 tahun pada tahun 2010. Angka ini masih berada di bawah angka rata-rata nasional, yang saat ini sudah mencapai 7,9 tahun. Ini berarti bahwa secara rata-rata, penduduk Sulawesi Selatan hanya mampu menyelesaikan pendidikan kelas I SMP dan putus sekolah pada saat menjelang naik kelas II SMP.

Data publikasi BPS memperlihatkan angka harapan hidup Sulawesi Selatan meningkat lebih cepat dibanding angka Nasional, namun masih lebih rendah dari angka Nasional. Angka harapan hidup Sulawesi Selatan meningkat cukup signifikan, yaitu dari 70,2 tahun pada tahun 2007 menjadi 70,8 tahun pada tahun 2010. Meskipun demikian, angka ini masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka harapan hidup rata-rata nasional yang sudah mencapai 70,9 tahun pada tahun 2010.

Data publikasi BPS juga memperlihatkan Daya beli yang diproksi dengan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan, meskipun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada di bawah angka rata-rata nasional. Pada tahun 2007, pengeluaran rata-rata per kapita sebulan hanya sebesar Rp 291.900,

dan kemudian meningkat menjadi Rp 461.810 pada tahun 2010 atau meningkat rata-rata sekitar 16,74 persen per tahun. Berbarengan dengan itu, pendapatan (PDRB) per kapita juga memperlihatkan peningkatan. Pada tahun 2007, pendapatan per kapita Sulawesi Selatan mencatat angka Rp 9,00 juta, dan kemudian meningkat menjadi Rp 14,67 juta pada tahun 2010 atau mengalami peningkatan rata-rata 16,47 persen per tahun. Namun jika dikomparasikan dengan Nasional, pendapatan per kapita Sulawesi Selatan jauh berada di bawah. Bahkan pendapatan per kapita Sulawesi Selatan hanya sekitar setengah dari angka Nasional.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan dan ketimpangan distribusi pendapatan dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu penelitian ini berjudul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010”**.

1.2 Masalah Pokok

Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak hanya melihat berapa besar tingkat *per capita Dome* *per to* saja tetapi melihat sejauh mana pembangunan tersebut dapat diterjemahkan kedalam beberapa aspek sehingga muncul suatu kondisi yang sejahtera. Salah satu bentuk keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia suatu daerah. Pembangunan manusia merupakan suatu bentuk investasi modal manusia dalam usaha ikut serta dalam

pembangunan nasional. Oleh karenanya dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah peningkatan pembangunan manusia.

Salah satu permasalahan pembangunan manusia di Sulawesi Selatan, yaitu Capaian kinerja IPM Sulawesi Selatan memang memiliki kecenderungan meningkat secara absolut. Namun peningkatan tersebut ternyata tidak cukup kuat untuk mengangkat posisi relatif IPM Sulawesi Selatan ke level yang diharapkan. Capaian ini menjadi tampak buruk mengingat berbagai dimensi pembangunan daerah lainnya justru menunjukkan kinerja yang cukup impresif, seperti pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun serta menurunnya tingkat kemiskinan, peningkatan laju pembangunan manusia sudah seharusnya juga dapat meningkat secara signifikan sebesar peningkatan laju pertumbuhan serta penurunan tingkat kemiskinan. Tetapi dalam kenyataannya perkembangan IPM Sulawesi Selatan mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidaklah terlalu besar. Sementara itu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan masih relatif minim sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan meningkat tiap tahunnya yang mana akan berdampak pada pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.

Dari masalah tersebut, muncul pertanyaan sebagai berikut:

Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan ”.

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh persentase penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.
5. Untuk mengetahui pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan.

1. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga sebagai tolak ukur atau gambaran pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.
2. Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, khususnya mahasiswa/i Departemen Ekonomi Pembangunan yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.
3. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni.

4. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang Indeks Pembangunan Manusia.

□A□ □□

□□□A□A□ □□□A□A

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Definisi Pembangunan Manusia

Definisi Pembangunan Manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Jika mengacu pada pengertian tersebut, maka penduduk menjadi tujuan akhir dari pembangunan, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana (*principal mean*) untuk tujuan tersebut. Definisi ini lebih luas dari definisi pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sisi manusianya, bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi.

Dari definisi yang diberikan oleh UNDP tersebut mencerminkan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan,

pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Produktivitas. Penduduk harus dimampukan untuk meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah. Pembangunan ekonomi, dengan demikian merupakan himpunan bagian dari model pembangunan manusia.
2. Pemerataan. Penduduk harus memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial. Semua hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kestinambungan. Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu diperbaharui.
4. Pemberdayaan. Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Pembangunan manusia pada hakikatnya adalah memperluas pilihan bagi masyarakat dengan tujuan akhir mencapai kesejahteraan tiap-tiap anggota masyarakat sehingga pembanguan manusia dalam hal ini juga mencakup berbagai aspek lainnya yaitu selain aspek ekonomi terdapat pula aspek sosial, politik, budaya serta aspek lainnya untuk menjadikan manusia lebih produktif dalam

berkegiatan. Dengan demikian paradigma pembangunan manusia mencakup dua sisi yaitu berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik.

Aspek pembangunan manusia ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia ini merupakan salah satu alternatif pengukuran pembangunan selain menggunakan Gross Domestic Bruto. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak.

Tingkat pendidikan dan kesehatan individu penduduk merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang tinggi menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting dalam upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan penduduk itu sendiri yang semuanya bermuara pada aktivitas perekonomian yang maju.

2.1.2. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk

mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu dipakai oleh program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir dan angka kematian bayi (infant mortality rate); pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.

2.1.2.1 Definisi dan Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu :

1. Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
2. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
3. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan

Manusia adalah sebagai berikut:

$$IPM = 1/3 (\text{Indeks } X_1 + \text{Indeks } X_2 + \text{Indeks } X_3)$$

Dimana:

X_1 = Indeks harapan hidup

X_2 = Indeks pendidikan

X_3 = Indeks standar hidup layak

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam analisa biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut:

Dimana:

I_i = Indeks komponen IPM ke i di mana $i = 1,2,3$

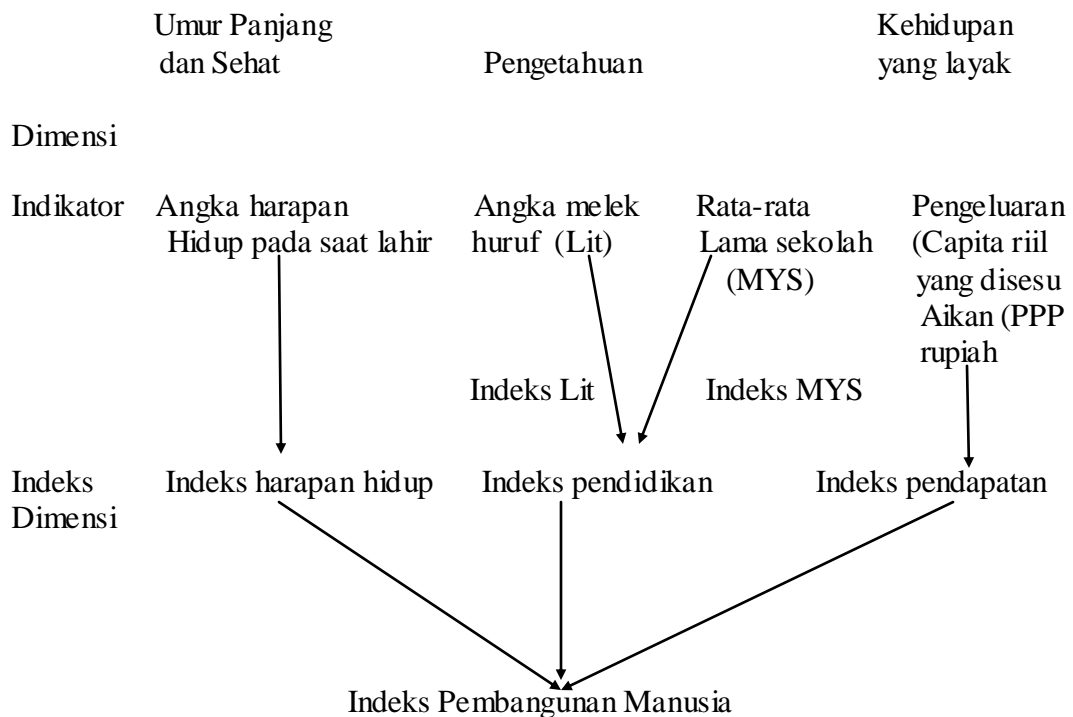
X_i = Nilai indikator komponen IPM ke i

$\text{Max} X_i$ = Nilai maksimum X_i

$\text{Min } X_i$ = Nilai minimum X_i

$$IPM = \sum_{i=1}^3 I_i : I_i = \frac{X_i - \text{Min} X_i}{\text{Max} X_i - \text{Min} X_i}$$

Struktur dan Indeks Pembangunan Manusia



*) PPP : Purchasing Power Parity

Sumber : Buku Indeks Pembangunan Manusia (2010 : 20) BPS

2.1.2.2 Komponen-komponen IPM

1. Indeks Harapan Hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel e_0 diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang

dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

2. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

3. Indeks Kualitas

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu

wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity).

2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses terjadinya kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional riil. Dengan kata lain, perekonomian mengalami perkembangan jika terjadi pertumbuhan output riil. Sedangkan menurut Suryana (2000:5) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (Gross Domestic Product) tanpa memandang kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk yang terjadi, serta tanpa memandang apakah terjadi perubahan dalam struktur perekonomiannya atau tidak.

Menurut Boediono (dalam Robinson Tarigan, (2004), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Sedangkan menurut (Simon Kuznetz dalam Todaro, 2004) pertumbuhan ekonomi adalah menaikkan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya.

Berikut ini beberapa teori pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Teori pertumbuhan klasik

Menurut Adam Smith sebagai ahli ekonomi klasik, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan

penduduk dan kemajuan teknologi. Kemudian menurut David Ricardo, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik-menarik antar dua kekuatan yaitu "the law of diminishing return" dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Mill, bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus penghambat pembangunan seperti adat istiadat, kepercayaan, dan berfikir tradisional.

Dari beberapa pendapat ahli ekonomi klasik dapat ditarik kesimpulan bahwa (Suryana, 2000:57):

- a. Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang dicapai.
- b. Kenaikan upah yang akan menyebabkan kenaikan penduduk.
- c. Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan modal. Jika tidak terdapat keuntungan maka akan mencapai "stationary state" yaitu suatu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali.
- d. *The law of diminishing return* berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan penambahan produk yang akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat sewa tanah.

2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Pada pertengahan tahun 1950-an berkembang teori pertumbuhan neo-klasik yang merupakan suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Perintisnya adalah Solow, kemudian diikuti dan dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan J.E Meade. Pendapat-pendapat para ahli tersebut, yaitu (Suryana, 2000:58):

- a. Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi.
- b. Perkembangan merupakan proses yang gradual.
- c. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
- d. Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan.
- e. Aspek internasioanl yang merupakan faktor bagi perkembangan.

Selanjutnya dalam Sadono (2004:437), menurut Solow yang menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya penambahan modal dan tenaga kerja. Namun faktor yang terpenting adalah kemajuan teknologi dan penambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.

3. Teori pertumbuhan ekonomi modern

a. Teori Pertumbuhan Rostow

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial, dan struktur kegiatan ekonominya. Dan dalam bukunya *The Stage of eonomi* ” 0 osto mengemukakan tahap-tahap dalam proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya ke dalam lima tahap, yaitu (Lincolin, 2004:48):

- 1) *The traditional society* (masyarakat tradisional)
 - 2) Persyaratan tinggal landas
 - 3) Tinggal landas
 - 4) Menuju kematangan
 - 5) Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi
- b. Teori pertumbuhan modern menurut Kuznet

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh berdasarkan kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis yang diperlukannya.

2.1. Kemiskinan

2.1.1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan refleksi dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar yang berlaku. Hendra Esmara (1986) mengukur dari ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar yang berlaku, maka kemiskinan dapat dibagi tiga: 1. Miskin absolut yaitu apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum; pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. 2. Miskin relatif yaitu seseorang sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. 3. Miskin kultural yaitu berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantu.

Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Delina Hutabarat (1994), menyebutkan sekurang-kurangnya ada enam macam kemiskinan yang ditanggung komunitas yaitu : 1. Kemiskinan Subsistensi yaitu penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal. 2. Kemiskinan Perlindungan yaitu lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah. 3. Kemiskinan Pemahaman yaitu kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan, dan potensi untuk mengupayakan perubahan. 4. Kemiskinan Partisipasi yaitu tidak ada akses dan control atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas. 5. Kemiskinan Identitas yaitu terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi. 6. Kemiskinan Kebebasan yaitu stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik ditingkat pribadi maupun komunitas.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara harfiah kata miskin diberi arti tidak berharta benda. Sayogyanya membedakan tiga tipe orang miskin, yakni miskin (*poor*), sangat miskin (*ver^o poor*) dan termiskin (*poorest*). Penggolongan ini berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahun. Orang miskin adalah orang yang berpenghasilan kalau diwujudkan dalam bentuk beras yakni 320 kg/orang/tahun. Jumlah tersebut dianggap cukup memenuhi kebutuhan

makan minimum (1,900 kalori/orang/hari dan 40 gr protein/orang/hari). Orang yang sangat miskin berpenghasilan antara 2240 kg, 320 kg beras/orang/tahun, dan orang yang digolongkan sebagai termiskin berpenghasilan berkisar antara 180 kg, 240 kg beras/orang/tahun. Menurut BPS, penduduk miskin adalah mereka yang asupan kalorinya di bawah 2,100 kalori berdasarkan kategori *food* dan *nonfood* diukur menurut infrastruktur antara lain jalan raya, rumah, serta ukuran sosial berupa kesehatan dan pendidikan.

2.1.2 **Definisi kemiskinan**

Nasikun menyoroti beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu : 1. *Policy induced process*, yaitu proses kemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan. 2. *Socio-economic Dilemma*, yaitu negara ekskoloni yang mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marginal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor. 3. *Population growth*, yaitu perspektif yang didasari pada teori Malthus bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan penambahan pangan seperti deret hitung. 4. *Resource management and The Environment*, yaitu adanya unsur misalnya manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas. 5. *Natural cycle and resource*, yaitu kemiskinan yang terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis =, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan kekurangan air, sehingga

tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal terus-menerus. 6. *The Marginalization of Women*, yaitu peminggiran kaum perempuan karena perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki. 7. *Cultural and Ethnic Factor*, yaitu bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat-istiadat yang konsumtif saat upacara adat-istiadat keagamaan. 8. *Plotative Intermediation*, yaitu keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir (lintah darat). 9. *Internal Political Fragmentation and Civil Unrest*, yaitu suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya yang kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan. 10. *International Trade*, yaitu bekerjanya sistem-sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi semakin miskin.

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan asset yang dimiliki, yaitu : 1. *Natural Asset*; seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya. 2. *Human Asset*; menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi). 3. *Physical Asset*; minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik dan komunikasi. 4. *Financial Asset*; berupa tabungan (*Saving*), serta akses untuk memperoleh modal usaha. 5. *Social Asset*; berupa jaringan, kontak dan

pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan *argaining position* dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

2.1. Ciri-ciri Karakteristik atau Ciri-ciri Kelompok Miskin

Emil Salim (1976) mengemukakan lima karakteristik kemiskinan, kelima karakteristik kemiskinan tersebut adalah : 1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. 2. Tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. 3. Tingkat pendidikan pada umumnya sendiri. 4. Banyak diantara mereka tidak mempunyai fasilitas. 5. Diantara mereka berusaha relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai.

Ciri-ciri kelompok (penduduk) miskin, yaitu : 1. Rata-rata tidak mempunyai faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja dan keterampilan, 2. Mempunyai tingkat pendidikan yang rendah. 3. Kebanyakan bekerja atau berusaha sendiri dan bersifat usaha kecil (sektor informal), setengah menganggur atau menganggur (tidak bekerja). 4. Kebanyakan berada di pedesaan atau daerah tertentu perkotaan (*slum area*). 5. Kurangnya kesempatan untuk memperoleh (dalam jumlah yang cukup), bahan kebutuhan pokok, pakaian, perumahan, fasilitas kesehatan sosial lainnya.

Kelompok penduduk miskin yang berada pada masyarakat pedesaan dan perkotaan, pada umumnya dapat digolongkan pada buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pemulung, gelandangan, pengemis, dan pengangguran.

2.1. Definisi dan Ciri-ciri

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang pemerintah lakukan, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. (Mangkoesobroto, 1994)

Menurut Suparmoko (1994:78) dalam Desi (2010:47) bahwa pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

1. Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi dimasa yang akan datang.
2. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
3. Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
4. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Sedangkan macam-macam pengeluaran pemerintah, yaitu :

1. Pengeluaran yang self liquidating sebagian atau sepenuhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa dan barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan pemerintah atau untuk proyek-proyek produktif.
2. Pengeluaran yang reproduktif, artinya mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan menaikkan penerimaan pemerintah.

Misalnya pengeluaran untuk bidang pertanian, pendidikan, dan pengeluaran untuk menciptakan lapangan kerja, serta memicu peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

3. Pengeluaran yang tidak termasuk self liquidating dan reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambahkan kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monument dan sebagainya.
4. Pengeluaran yang merupakan penghematan dimasa akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu, pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsurkan pos-pos pengeluaran untuk membiayai pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang), angsuran dan utang pemerintah, serta jumlah pengeluaran lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya adalah pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, yang dibedakan atas pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek.

2.1. Fungsi dan Tujuan Anggaran Pendapatan

2.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan

Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy, 1999).

Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu: distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro, 2000).

Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.

Menurut Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (dalam Lincoln Arsyad, 1997) ada 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (Capital Intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.

6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi Negara Sedang Berkembang dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor Negara Sedang Berkembang.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

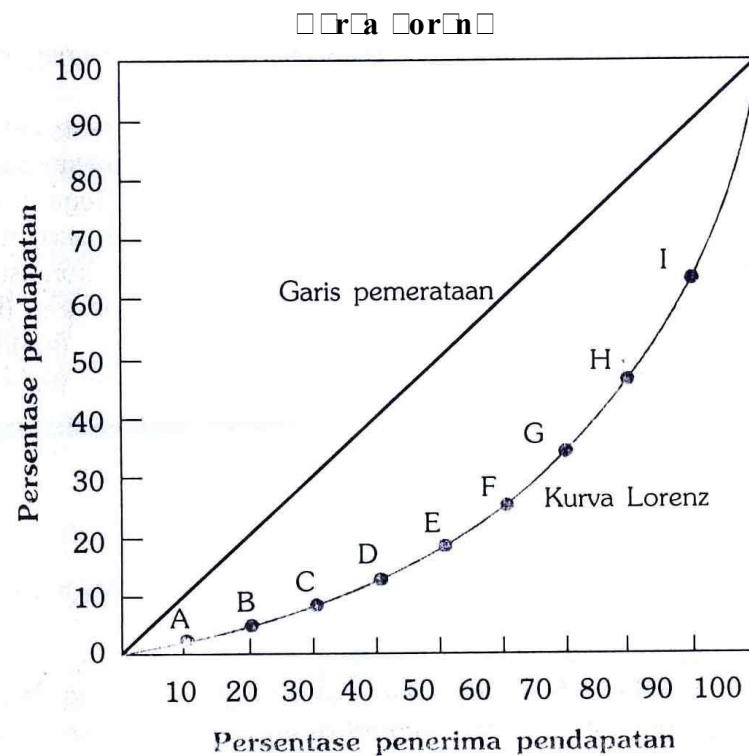
2.1.2 Teknik Perhitungan Ketimpangan Industri Pendapatan

Untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau mengetahui apakah distribusi pendapatan timpang atau tidak, dapat digunakan kategorisasi dalam kurva Lorenz atau menggunakan koefisien Gini dan Ukuran Bank Dunia dan satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah, yaitu dengan Indeks Williamson.

1. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang

semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata.
(Lincoln Arsyad,1997).



2. Indeks atauasio ini

Pendapat atau ukuran berdasarkan koefisien Gini atau Gini ratio dikemukakan oleh C.GINI yang melihat adanya hubungan antara jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh keluarga atau individu dengan total pendapatan. Ukuran Gini Ratio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara 0 sampai dengan 1. Bila Gini Ratio mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Gini Ratio mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi.

Rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Gini Ratio adalah :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Keterangan:

G = Gini Ratio

P_i = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

Q_i = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

Q_{i-1} = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

k = Banyaknya kelas pendapatan

Nilai Gini antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makroekonomi, LPEM-FEUI, 1995 :

- $GR < 0.4$ dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- $0.4 \leq GR \leq 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- $GR > 0.5$ dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

□ **□k□ran □ank □□nia**

Bank Dunia yang bekerjasama dengan Institute of Development Studies menentukan kriteria tentang penggolongan distribusi pendapatan, apakah dalam keadaan ketimpangan yang parah, sedang, atau ringan. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa:

- a. Jika 40 persen penduduk suatu negara berpendapatan terendah memperoleh sekitar kurang 12 persen jumlah pendapatan negara tersebut maka hal ini termasuk kedalam ketimpangan yang tinggi.
- b. Kelompok kedua adalah 40 persen dari jumlah penduduk yang berpendapatan terendah, tetapi hanya menerima antara 12-17 persen dari seluruh pendapatan negara. Golongan ini masih dapat dikatakan sebagai keadaan dengan ketimpangan yang sedang.
- c. Jika golongan penduduk yang 40 persen tersebut memperoleh lebih dari 17 persen dari total pendapatan negaranya, maka tingkat ketimpangannya termasuk rendah. (Mudjarat Kuncoro, 2003)

□ Indeks □ illia □ son

Ukuran ketimpangan pendapatan lainnya yang lebih penting lagi untuk dikaji adalah kesenjangan antar wilayah/ daerah dengan menggunakan perhitungan indeks Williamson. Indeks Williamson yang diperkenalkan oleh Williamson dalam tulisannya tahun 1965 merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional. Metode ini diperoleh dari perhitungan perkapita dan jumlah penduduk di suatu negara.

Secara sistematis perhitungan Indeks Williamson adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y}$$

Dimana:

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB perkapita di Kabupaten/kota i

Y = PDRB perkapita di Provinsi

f_i = Jumlah penduduk di Kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk di Provinsi

Besarnya Indeks Williamson ini bernilai positif dan berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai index ini (mendekati angka satu) berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Sebaliknya semakin kecil nilai index ini (mendekati angka nol) berarti semakin merata tingkat pemerataan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut.

Oshima menetapkan kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, apakah ada ketimpangan tinggi, sedang atau rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut:

- Ketimpangan Tinggi jika $IW > 0,5$
- Ketimpangan Sedang jika $IW = 0,35 - 0,5$
- Ketimpangan Rendah jika $IW < 0,35$.

Namun demikian Indeks Williamson ini mempunyai kelemahan yakni penghitungan ini baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global sejauh mana dan berapa besar bagian yang diterima oleh kelompok yang berpendapatan rendah atau miskin bertambah tidak tampak dengan jelas.

2.1. Peranan antara pertumbuhan ekonomi tingkat miskin, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

2.1.1 Peranan antara pertumbuhan ekonomi dan

Menurut Midgley (1995), menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan penelekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan

proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan sosial tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi tidaklah bermakna kecuali diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial dari populasi sebagai suatu kesatuan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui penciptaan kesempatan kerja.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004).

Ramirez dkk (1998) menyebutkan bahwa ada hubungan timbal balik (two-way relationship) antara human capital dan pertumbuhan ekonomi. Studi Ramirez berangkat dari terdapatnya hubungan dua arah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia (human development). Hubungan yang dimaksudkan oleh Ramirez dkk tersebut adalah sebagai berikut :

Porta adalah dari pertumbuhan ekonomi dan lingkungan.

GNP mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah; civil society seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga. Dalam membelanjakan pendapatannya,

rumah tangga cenderung membelanjakan barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia seperti makanan, air, pendidikan dan kesehatan yang tergantung pada sejumlah faktor seperti tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga, siapa yang mengontrol alokasi pengeluaran dalam rumah tangga. Umumnya, penduduk miskin menghabiskan porsi pendapatannya lebih banyak ketimbang penduduk kaya untuk kebutuhan pembangunan manusia dan andil perempuan cukup besar dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Ketika tingkat kemiskinan tinggi, yang dikarenakan rendahnya pendapatan per kapita atau karena buruknya distribusi pendapatan, pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pembangunan manusia menjadi rendah. Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mereduksi kemiskinan, reduksi kemiskinan sangat bervariasi dengan distribusi pendapatan dan berubah-ubah. Pereduksian distribusi pendapatan dan kemiskinan melalui pertumbuhan sangat tergantung pada proses pertumbuhan ekonominya- secara khusus didasarkan pada penciptaan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan pedesaan.

Peranan fungsi alokasi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia adalah fungsi total pengeluaran sektor publik, seberapa besar alokasi pengeluaran sector public untuk sector pembangunan manusia, dan bagaimana pengeluaran tersebut dialokasikan. Peranan alokasi pengeluaran public oleh pemerintah ini sangat memegang peranan yang sangat penting didalam pembangunan manusia.

Peranan organisasi masyarakat dan LSM memegang peranan sebagai factor pendukung dan pelengkap didalam pembangunan manusia. Pembangunan

manusia akan menjadi lebih efektif apabila peranan organisasi masyarakat dan LSM menempati salah satu ruang pembangunan manusia.

Hubungan antara Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi

Memerhatikan hubungan kedua, dari pembangunan manusia ke pertumbuhan ekonomi, ada sebuah asumsi dan didukung oleh pembuktian, bahwa masyarakat yang lebih sehat, dipelihara dengan baik dan berpendidikan akan berkontribusi menyokong pertumbuhan ekonomi. Tingginya pembangunan manusia akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kemampuan atau kapabilitas masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan peningkatan kreatifitas dan produktifitas masyarakat.

Jelas bahwa kesehatan dan pendidikan masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam komposisi dan pertumbuhan output dan ekspor. Kesehatan dan pendidikan masyarakat juga menjadi salah satu factor penting di dalam membangun sebuah sistem produksi dengan penggunaan teknologi secara efektif. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan mendorong peningkatan modal manusia, mendorong peningkatan produktifitas masyarakat (tenaga kerja), mendorong kemampuan masyarakat untuk mengadaptasi dan mepergunakan teknologi didalam produksi serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan kapasitas dan teknikal teknologi dalam industry.

Peningkatan modal manusia, peningkatan produktifitas, kemampuan mengadaptasi dan menggunakan teknologi dalam produksi dan kemampuan mengadaptasi perubahan kapasitas dan teknikal teknologi tersebut pada akhirnya

akan mendorong perekonomian suatu negara serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pembangunan manusia ini juga membutuhkan investasi yang besar dan diikuti juga dengan pemerataan distribusi pendapatan sehingga dengan investasi dan pemerataan pendapatan tersebut pada akhirnya akan mempermudah peningkatan pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) kriteria, yaitu seimbang (balanced) dan tidak seimbang (unbalanced). Untuk yang seimbang dibedakan lagi antara kuat dan lemah. Kategori seimbang yang pertama, terjadi hubungan kuat (strong link) antara pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia. Sementara kategori seimbang yang kedua, berlangsung hubungan lemah (weak link) antar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Kategori tidak seimbang” un a an ed ink memiliki iri pertumbuhan ekonomi re ati lambat tetapi pembangunan manusia relatif cepat atau sebaliknya.

Istilah modal manusia (human capital) pertama kali dikemukakan oleh Gary S. Becker. Ace Suryadi (1994) yang mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori Human Capital, yaitubahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan penduduk ditentukan oleh produktivitas

perorangan. Jika setiap orang memiliki penghasilan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang. Sejak tahun 1999, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep pengukuran mutu modal manusia yang diberinama Human Development Index atau disebut IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Adanya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dapat memungkinkan meningkatnya output dan pendapatan dimasa yang akan datang sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.2 Hubungan antara tingkat kemiskinan dan IPM

Menurut UNDP (1996) hubungan antara tingkat kemiskinan dan pembangunan manusia, yaitu banyaknya penduduk miskin turut mempengaruhi pembangunan manusia. Karena penduduk yang masuk kelompok ini, pada umumnya memiliki keterbatasan pada faktor produksi, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Akibatnya produktivitas menjadi rendah, pada gilirannya pendapatan yang diterima pun jauh dari cukup. Dampaknya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan mengalami kesulitan. Apalagi untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lainnya menjadi terhambat. Implikasinya pada wilayah-wilayah yang terdapat cukup banyak penduduk miskin, akan mengalami kesulitan untuk mencapai keberhasilan pada pembangunan manusianya.

Apriliyah S. Napitupulu (2007), mengatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh dalam penurunan jumlah penduduk miskin. Indeks Pembangunan Manusia memiliki indikator komposit dalam penghitungannya

antara lain angka harapan hidup, angka melek huruf, dan konsumsi per kapita. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah.

Todaro (2000) juga mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Yang mana pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Ranis (2004), jika penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau dengan kata lain terjadi pengurangan tingkat kemiskinan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga pengurangan kemiskinan dapat kita lihat dari jumlah penduduk miskin tersebut, atau dengan kata lain dengan berkurangnya penduduk miskin maka pembangunan manusia akan mengalami peningkatan.

Menurut Yani Mulyaningsih (2008) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (Longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga

dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Lanjouw, dkk. (2001) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan memperkerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan bersedia memberikan gaji yang lebih tinggi bagi yang bersangkutan. Di sektor informal seperti pertanian, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan mampu meningkatkan hasil pertanian, karena tenaga kerja yang terampil mampu bekerja lebih efisien. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang

diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K dan Bonar M, 2004).

2.1. Hubungan antara Perencanaan Pemerintah Pendidikan dan Pembangunan dan

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (Dumairy, 1997).

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak.

Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antarsektor yang makin kompleks. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri akan menimbulkan semakin tingginya pencemaran atau polusi. Pemerintah harus turun tangan mengatur dan

mengurangi dampak negatif dari polusi. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Basri, 2005).

Musgrave (1980) berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam presentase terhadap PDB semakin besar dan presentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pendidikan, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya (Dumairy, 1997).

Teori Rostow dan Musgrave adalah pandangan yang timbul dari pengamatan atas pengalaman pembangunan ekonomi yang dialami banyak negara tetapi tidak didasari oleh suatu teori tertentu. Selain tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap atau beberapa tahap dapat terjadi secara simultan. (Mangkoesobroto, 1994).

Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental (Lanjouw, dkk 2001).

Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi

teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch (2000), pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ada disebutkan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengalokasikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan di luar gaji dan biaya kedinasan. Jadi, anggaran pendidikan yang dimaksud di sini adalah termasuk kategori anggaran pembangunan karena tidak termasuk di dalamnya anggaran rutin yang berupa gaji dan lain-lain.

Sedangkan untuk masalah kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia, tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat menghasilkan suatu produktivitas bagi negara. Kegiatan ekonomi suatu negara akan berjalan jika ada jaminan kesehatan bagi setiap penduduknya. Terkait dengan teori human capital bahwa modal manusia berperan signifikan, bahkan lebih penting daripada faktor teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi (Setiawan, 2006).

Negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik seperti kesehatan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Sarana kesehatan dan jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah.

2.1. Perbandingan antara kinerja pembangunan manusia antara distribusi pendapatan dan peran PM

Kinerja ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah, selain adanya peran civil society seperti melalui organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Alokasi antar dan dalam lembaga-lembaga tersebut dan perbedaan perilakunya dapat menjadi penyebab perbedaan kinerja pembangunan manusia sekalipun tingkat kinerja ekonominya setara.

Sementara itu, kecenderungan rumah tangga untuk membelanjakan pendapatan bersih mereka untuk barang-barang yang memiliki kontribusi langsung terhadap pembangunan manusia (seperti makanan, air, pendidikan dan kesehatan) tergantung dari sejumlah faktor seperti tingkat dan distribusi pendapatan antar rumah tangga dan juga pada siapa yang mengontrol alokasi pengeluaran dalam rumah tangga. Sudah umum diketahui bahwa penduduk miskin menghabiskan porsi pendapatannya lebih banyak ketimbang penduduk kaya untuk kebutuhan pembangunan manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia ditentukan bukan hanya oleh tingkat pendapatan, tetapi juga oleh distribusi pendapatan dalam masyarakat, dan peran pemerintah.

Tingkat pembangunan manusia yang tinggi akan mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah juga pada produktifitas dan kreatifitas mereka. Pendidikan dan kesehatan penduduk sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi

sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan pendidikan yang baik, pemanfaatan teknologi ataupun inovasi teknologi menjadi mungkin untuk terjadi. Begitu pula, modal sosial akan meningkat seiring dengan tingginya pendidikan. Seperti diungkapkan oleh Meier dan Rauch (2000), pendidikan, atau lebih luas lagi adalah modal manusia, dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan. Hal ini karena pendidikan pada dasarnya adalah bentuk dari tabungan, menyebabkan akumulasi modal manusia dan pertumbuhan output agregat jika modal manusia merupakan input dalam fungsi produksi agregat.

Tentu dalam kaitan itu juga penting adanya distribusi pendapatan. Dengan distribusi pendapatan yang baik membuka kemungkinan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini karena dengan meratanya distribusi pendapatan maka tingkat kesehatan dan juga pendidikan akan lebih baik dan pada gilirannya juga akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja. Studi Alesina dan Rodric (lihat Meier dan Rauch, 2000) menemukan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak buruk juga pada pembangunan manusia suatu daerah.

Dengan kata lain, pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih meyakinkan jika memang sudah ada kebiasaan untuk mendukung pendidikan yang baik yang juga ditentukan oleh tahapan pembangunan itu sendiri. Selain itu, pengaruh positif dari pembangunan manusia tersebut akan kuat jika terdapat distribusi pendapatan yang lebih merata,

dukungan untuk modal sosial yang lebih baik, serta kebijakan ekonomi yang lebih memadai. (Aloysius Gunadi Brata, 2002)

Pertumbuhan ekonomi sebenarnya tidak dapat disederhanakan hanya dengan menyimak tinggi atau rendahnya angka pertumbuhan. Tetapi dibalik itu yang tak kalah penting adalah apa yang disebut sebagai kualitas pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas digerakan oleh peningkatan kapasitas produksi masyarakat, walaupun angka tidak terlalu tinggi, jauh lebih tinggi kualitasnya karena mempengaruhi pembangunan manusia diantaranya dapat menggerakkan pendapatan perkapita, dan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat memperbaiki pola distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat sehingga banyak penduduk yang memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya untuk membeli kebutuhan makanan, pendidikan, kesehatan dan perumahan sehingga dapat mempercepat pembangunan manusia (Kajian Aloysius Gunadi Brata 2004, LPU Univ. Atmajaya Yogyakarta, dalam jurnalnya menguraikan adanya hubungan simultan antara kinerja ekonomi dan pembangunan manusia).

Upaya meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak dapat diukur hanya dari aspek pertumbuhan ekonomi semata tetapi yang lebih penting seberapa jauh geliat perekonomian dapat dinikmati oleh masyarakat sehingga aspek pemerataan dan pola konsumsi masyarakat merupakan hal yang selalu terkait untuk dicermati. Asumsi bahwa laju pertumbuhan ekonomi akan mampu meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat terkadang masih memiliki suatu peluang untuk memunculkan suatu masalah ketimpangan pendapatan.

2.2. Penelitian Penelitian Lanjouw

Penelitian yang dilakukan oleh Alex Febrianto M. (2009), dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia" adalah variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin sedangkan variabel bebasnya terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi. Hasil dari regresi yang ditunjukkan dalam penelitiannya menunjukkan hubungan dari variabel-variabel antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah penduduk miskin adalah negatif sedangkan pada sisi yang lain menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi dengan penduduk miskin adalah positif. Artinya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada sisi lain pengangguran dan inflasi harus dikurangi.

Penelitian yang dilakukan Lanjouw, dkk (2001) yaitu dengan menganalisis bagaimana hubungan antara kemiskinan, pendidikan dan kesehatan beserta kaitannya dengan pengeluaran pemerintah untuk pelayanan publik. Penelitian dengan metode statistik deskriptif ini menemukan bahwa penduduk miskin sangat membutuhkan pelayanan/subsidi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan yang baik akan meningkatkan kapasitas dan kemerdekaan hidup yang dinamakan manfaat intrinsik. Pendidikan dan kesehatan berperan membuka peluang yang lebih besar untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi yang dinamakan manfaat instrumental. Lanjouw dan kawan-kawan juga hendak memuktikan report tahunan 2007 bertajuk "Indonesia: Strategy for a

Maintained Redirection in Poverty yang menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah hal yang critical (sangat mendesak) untuk diberikan kepada penduduk miskin di Indonesia, sehingga sangat dibutuhkan peningkatan investasi di kedua bidang tersebut.

Dalimunthe dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara, menganalisa pengaruh dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, investasi PMDN dan kondisi perekonomian terhadap jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara. Dalam persamaan model, jumlah penduduk miskin adalah sebagai variabel terikat sedangkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, investasi PMDN dan kondisi perekonomian (dummy variabel) adalah sebagai variabel bebas. Analisis perhitungan merekomendasikan bahwa jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan, investasi PMDN dan kondisi perekonomian. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa sekitar 85,86%. Hal ini berarti bahwa jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang ada di dalam model. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh variabel independen signifikan sebesar 1% terhadap jumlah penduduk miskin.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Ilham Irawan (2009) dalam skripsinya yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia IPM di Indonesia" bahwa variabel terikat dalam penelitian ini adalah indeks pembangunan manusia, sedangkan variabel bebasnya terdiri dari

pertumbuhan ekonomi dalam hal ini PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Hasil dari penelitian ini adalah tiga dari empat variabel memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, yaitu PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, penanaman modal asing, dan variabel lainnya yaitu penanaman modal dalam negeri tidak signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

2.1.1. **Definisi**

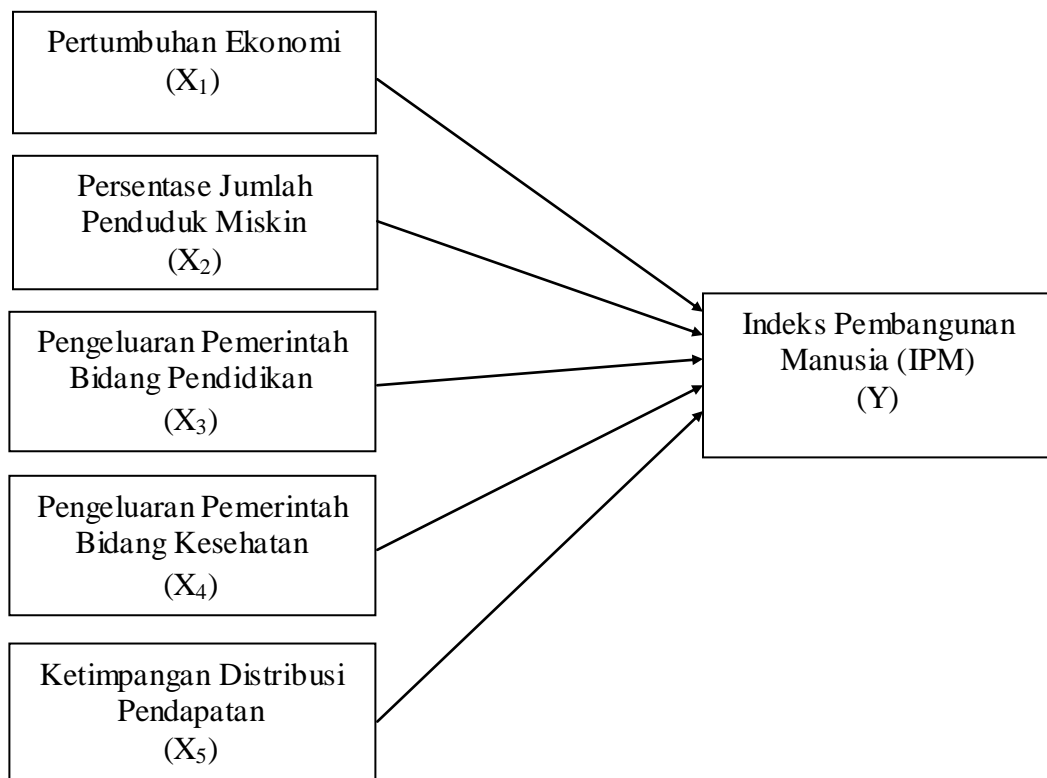
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikenal dengan *Human Development Index*. Dimana indikator ini digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari hasil pembangunan ekonomi yaitu derajat perkembangan manusia, kemudian perlu ditambahkan bahwa nilai IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pentingnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi, maka perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selanjutnya menurut M. Ilham Irawan (2009) dalam judul penelitiannya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (PDB), anggaran pengeluaran pemerintah dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan sedangkan penanaman modal dalam negeri berpengaruh tidak signifikan namun memberikan pengaruh yang positif terhadap IPM. Lebih lanjut Alex Febrianto M (2009) yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah

penduduk miskin adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan inflasi, dimana pengangguran dan inflasi berpengaruh positif.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dalam melakukan penelitian mengenai IPM khususnya di Sulawesi Selatan maka variabel yang akan di ukur, yaitu: pertumbuhan ekonomi (PDRB), persentase penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Alasannya dalam pemilihan variabel penelitian ini adalah berdasarkan penelitian sebelumnya. Oleh karena itulah dalam menguji pengaruh faktor (pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan, dan ketimpangan distribusi pendapatan) terhadap IPM. Hal ini dapat dilihat dari kerangka pikir yaitu sebagai berikut:

Skema 1. Kerangka Pikir



2. □ □ i □ o t □ s i s

Berdasarkan rumusan masalah yang sebagaimana telah diuraikan maka yang menjadi hipotesis yaitu sebagai berikut :

1. Diduga pertumbuhan ekonomi (PDRB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan.
2. Diduga pula persentase penduduk miskin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan.
3. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan.
4. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan.
5. Diduga bahwa ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sulawesi Selatan.